

# Berita Yudha

MEMPERTINGGI KETAHANAN DAN PERJUANGAN NASIONAL INDONESIA

SELASA, 4 AGUSTUS 1998 ■ NO. 1739 TH. XXXI

TERBIT 8 HALAMAN ■ HARGA Rp 900,-

## Letjen TNI Prabowo Dinonaktifkan

### ■ Bersama Muchdi Dan Chairawan Diajukan Ke DKP

Jakarta, BY

Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Inf Chairawan resmi diajukan ke Dewan Kehormatan Perwira untuk mempertanggungjawabkan keterkaitannya dengan kasus penculikan sejumlah aktivis.

Hal ini ditegaskan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto kepada ratusan wartawan di Dephankam/Mabes ABRI Jl Medan Merdeka Barat Jakarta, Senin (3/8).

Dalam acara tersebut, Wiranto didampingi oleh Kasad Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, Kasal Laksamana Madya TNI Widodo AS, Kasau Marsekal Madya TNI Hanafie Asnan dan Kapolri Letjen Pol Drs Roesmanhadi.

Selain itu hadir pula Sekjen Dephankam Letjen TNI Soeyono, Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Puspen Dephankam/ABRI Mayjen TNI Syamsul Maarif serta para kepala dinas penerangan angkatan dan Polri.

Kepada wartawan, secara resmi Wiranto mengumumkan dibentuknya Dewan Kehorma-

tan Perwira (DKP) sebagai bagian upaya untuk menuntaskan kasus penculikan aktivis. (Lihat boks)

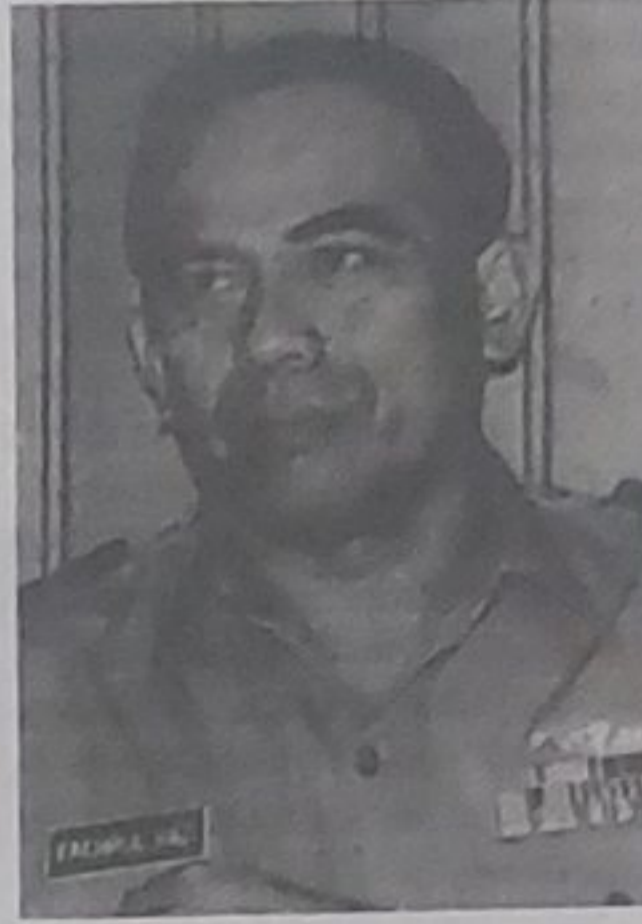
Reformasi ABRI

Menurut Wiranto, jika dalam proses pemeriksaan DKP berkembang hingga menduga mereka melakukan tindakan berunsur pidana, tidak menutup kemungkinan diajukan ke Mahkamah Militer.

"Tidak ada seorang pun yang kebal untuk diajukan ke Mahmil," kata Wiranto.

Ia membantah spekulasi yang mengatakan diajukannya Prabowo dan Muchdi ke DKP itu bermuatan politik. Menurutnya, pernyataan yang menyebutkan bahwa Prabowo adalah lawan politiknya sama sekali tidak menjadi alasan.

"Proses ini bebas dari masalah politik dan porses ini betul-betul keluar dari tekad dan niat dari ABRI untuk



Searah jarum jam — Wiranto, Subagyo HS, Fachrul Razi, Chairawan, Muchdi PR dan Prabowo Subianto.

mencapai ABRI baru dalam reformasi ini yang bisa mengemban tugas lebih komplitatif," ujarnya.

"ABRI itu satu jiwa banyak raga dan hidup bersatu mati bersama. Jadi kalau kita berbeda pendapat ketika mengaplikasikan sesuatu ilmu, itu adalah biasa saja untuk memperkaya wawasan kita, tapi kalau hati nurani berbeda, itu tunggu dulu," lanjut Wiranto.

Ia berharap itikad ABRI untuk menuntaskan kasus ini jangan sampai berkembang dengan adanya spekulasi-spekulasi lain yang justru nantinya mempersulit niat ABRI untuk membersihkan diri.

Dua Sistem

Dalam kesempatan ini, Menhankam/Pangab mengungkapkan dua sistem dalam upaya penyelesaian kasus orang hilang ini. Selain membentuk DKP, ABRI juga tetap melakukannya melalui Mahkamah Militer.

Dalam tahap pertama, kata Wiranto, pengadilan Mahmil akan menggelar perkara terhadap 10 prajurit ABRI, terdiri dari 7 perwira dan 3 bintara yang patut diduga tindakannya memenuhi tuntutan pidana terhadap kasus orang hilang.

Tetapi, Wiranto tidak merinci siapa-siapa saja ke 10 prajurit ABRI yang akan diajukan ke mahmil itu.

Berkaitan dengan masa

kerja DKP, Wiranto mengatakan bekerja secepatnya, tergantung pada seberapa jauh bisa diungkap pelanggaran dalam proses itu.

Dinonaktifkan

Sementara itu Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, selama dalam pemeriksaan DKP Letjen TNI Prabowo Subianto akan dinonaktifkan dari jabatannya.

"Hal ini supaya tidak melibatkan institusinya. Jadi yang diperiksa itu sebagai Letjen TNI Prabowo bukan sebagai Dansesko ABRI-nya," katanya.

Menurut Subagyo, kemungkinan besar karir militer Prabowo akan berakhir apabila dalam pemeriksaan tim DKP nanti terbukti ia terlibat berat dalam kasus penculikan tersebut.

"Ya, kemungkinan (karirnya

terhenti) tergantung besar kecil dan berat ringannya perwira tersebut membuat kesalahan," ujarnya.

Apabila keterlibatannya demikian besar, kata Subagyo, bukan tidak mungkin Prabowo akan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer TNI AD.

Menjawab pertanyaan, apakah memeriksa Prabowo — yang sama-sama dari kesatuan Kopassus — tidak berarti memikul tugas berat yang cukup memukul dirinya, Subagyo menggelengkan kepalanya.

"Saya bukan bertugas mengadili. Mengadili itu bukan tugas DKP. DKP dibentuk untuk membantu Pangab dalam mengambil keputusan jadi bentuk dan hasil dari DKP itu hanya saran untuk dilaporkan kepada Pangab," katanya. (nan/aja)

### Ginandjar Minta Pertamina Bantu 'Road Show'

Jakarta, BY

Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita meminta bantuan akomodasi dan transportasi kepada Pertamina untuk kepentingan road show selama sepuluh hari ke Amerika dan Jepang.

Demikian isi surat dari Sekretaris Pribadi Menko Ekuin kepada Direktur Umum yang diterima pers di Jakarta, kemarin (3/8).

Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Pribadi Menko Ekuin K Inugroho itu tertulis, "Sehubungan perjalanan dinas tersebut, maka diminta bantuan berupa asistensi, akomodasi dan transportasi kepada Pertamina."

Namun Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita nampaknya membantah masalah ini.

Ketika dikonfirmasi sesuai Rakor Bidang Ekuin di Bappenas Jakarta, kemarin (3/8) siang, pihaknya tidak berbicara banyak mengenai masalah ini.

Informasi yang dihimpun BY di Bappenas, pada 2 Juli 1998 lalu, Sekretaris Pribadi Menko Ekuin K Inugroho telah mengirimkan surat permohonan bantuan pembiayaan kepada Pertamina untuk kepentingan road show Menko Ekuin ke Amerika Serikat (7-11 Juli) dan Jepang (11-15 Juli).

Surat tersebut berkop Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dan ditandatangani langsung oleh Sekretaris Pribadi Menko Ekuin K Inugroho. Di sebelah kiri surat disebutkan bahwa surat bersifat 'segera'.

Sementara itu, di tempat sama, Mentamben Kuntoro Mangkusubroto mengatakan tidak mengetahui masalah tersebut. "Tunggu dulu, ini apa, desas-desus atau sungguhan," katanya.

Namun Mentamben berjanji akan meluruskan masalah ini dan menyelesaikannya.

Ketika ditanya, apakah sinyelemen ini disebabkan karena pemerintah tidak memiliki dana untuk membiayai perjalanan dinas pejabat negara, Mentamben mengatakan, "Pemerintah memiliki dana dan biasanya dana perjalanan dinas diambil dari DIK (Daftar Isian Kegiatan)." (ikh/bin)

## Tokoh: DKP Harus Obyektif

Hendardi SH, Direktur PBHI

Pembentukan DKP walaupun sesuai dengan terleb militer namun DKP hanya akan memberi saksi secara administrasi.

Ia berpendapat pengadilan terhadap para perwira yang terlibat dalam kasus penculikan tersebut hendaknya dilakukan dengan terbuka agar masyarakat luas mengetahui siapa sesungguhnya pelaku dan otak pelaku kasus penculikan tersebut.

Bambang Triantoro, Mantan Kassospol ABRI

Ia mengatakan, kendati banyak orang melihat Ketua DKP Jenderal Subagyo pernah dekat dengan bekas Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto, namun para perwira tinggi AD yakin Subagyo akan mampu menjalankan tugasnya.

Bambang percaya Subagyo akan melakukan pemeriksaan dengan sejujur-jujurnya, karena dasarnya berkenaan dengan citra Angkatan Darat. Jangan karena membela satu orang lalu merusak citra kesatuan.

Ia menyorankan masyarakat tidak buru-buru curiga terhadap Jenderal Subagyo. Hubungan dekatnya dengan Prabowo, tidak akan memaksa dia untuk bertindak kongkalikong.

Bambang Triantoro berharap agar DKP dapat mengungkap

siapa pelaku penculikan terhadap para aktivis itu.

Sebagai senior AD, ia mengungkap sempat merinding ketika tersiar kabar bahwa beberapa perwira tinggi AD terlibat dalam peristiwa itu.

"Tapi dengan diperiksanya Prabowo dkk oleh DKP, kami para senior AD merasa plong. Kami berharap Subagyo dapat mengembalikan citra AD dan Korps Baret Merah."

Bambang W Soeharto, Anggota Komnas HAM

Ia berpendapat dibentuknya DKP dalam proses pemeriksaan tiga perwira tersebut akan mampu memilah-milahkan siapa yang terlibat kasus penculikan secara obyektif.

Menurut anggota Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) peristiwa 14 Mei ini, dari pemilahan itu dapat diketahui mana perwira yang diajukan ke Mahkamah Militer dan yang mana dikenakan sanksi administratif secara militer.

Ia mengatakan, dibentuknya DKP sesuai dengan terleb militer. Maka penilaian dalam pemeriksaannya nanti disesuaikan pula dengan kesalahan militer.

Tetapi pembentukan Dewan Kehormatan ini tidak menutup penghindaran mereka dari tuntutan pengadilan.

(izz/nul/aji/ken)

### Tim Dewan Kehormatan Perwira (DKP)

Ketua : Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo (Kasad)  
Wakil : Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI)

Anggota Tetap

1. Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irijen Dephankam)
2. Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI)
3. Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhanas)
4. Laksamana Madya TNI Achmad Soetjipto (Danjen Akabri)
5. Letjen TNI Djamarri Chaniago (Pangkostrad)

Anggota Cadangan

1. Letjen TNI Arie J Kumaat (Patl Mabes ABRI)
2. Letjen TNI Sugiono (Wakasad)

### Kejujuran Dan Disiplin

Kejujuran kadang punya korelasi dengan kedisiplinan. Karena dengan jujur kepada diri sendiri, maka kita akan mampu mendisiplinkan diri. Sehingga saat tidak ada petugas lalu-lintas di jalanpun kita akan tetap disiplin melaksanakan aturan di jalan raya. Atau ketika kita melakukan kesalahan, maka dengan jujur kita mengakui kesalahan itu. Maka kita sudah mentertibkan diri sendiri. Sudahkah berdisiplin pada diri sendiri.

Disampaikan TNI Angkatan Darat, bekerja sama dengan Berita Yudha untuk menyelesaikan Gerakan Disiplin Nasional

### TOPIK HARI INI

Hal 3  
INFLASI Juli 8,56.

Hal 6  
WAKIL Gubernur wanita pertama.

Hal 7  
42 wisatawan jadi korban keganasan banjir di Korea Selatan